

# SEKILAS APBN

## Budget Issues Quick Response

### PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI SALAH SATU KUNCI HADAPI KRISIS EKONOMI GLOBAL

Adhi Prasetyo



Eskalasi risiko global yang terjadi dewasa ini menciptakan risiko krisis pangan, energi, serta meningkatkan probabilitas resesi di banyak negara. Potensi krisis pangan dan energi tentunya juga menjadi ancaman serius bagi negara berpendapatan rendah yang memiliki ketergantungan terhadap impor dan akan menghadapi kerentanan fiskal. Kondisi ini ditengarai akan terus berlangsung hingga tahun 2023. Perlambatan ekonomi negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, berpotensi memberikan tekanan kepada intensitas perdagangan internasional. Lebih lanjut, dampak resesi ekonomi sangat berdampak bagi masyarakat yang berujung lemahnya daya beli dan perlambatan ekonomi.

Untuk itu kebijakan APBN perlu diarahkan sebagai motor penggerak guna mengantisipasi tekanan atas gejolak ekonomi yang nantinya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Saat ini sudah ada berbagai aturan mulai dari Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021, Instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021 yang semuanya mengamanatkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri paling sedikit 40 persen yang dialokasikan kepada pelaku UMKM.

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap produk impor. Kebijakan tersebut juga dapat menjadi proteksi tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar, menciptakan kemandirian bangsa Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 1,6-1,7 persen.

Meskipun demikian menurut BPK RI dalam pelaksanaan program P3DN masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain: **pertama**, pelaksanaan P3DN belum didukung dengan rencana pengembangan peningkatan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (roadmap) serta penetapan produk prioritas yang akan dikembangkan. **Kedua**, pelaksanaan sertifikasi TKDN masih belum didukung dengan standar serta prosedur yang memadai sebagai panduan produsen dan surveyor yang melaksanakan verifikasi capaian TKDN. **Ketiga**, pengawasan dan evaluasi terhadap P3DN belum sepenuhnya dilakukan serta dilaporkan sehingga mengakibatkan tidak dapat mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan P3DN sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan serta perbaikan P3DN.

Mengingat pentingnya program P3DN dalam menghadapi krisis ekonomi global, tentu membutuhkan pengawasan dan pengawasan, dengan memperhitungkan adanya beberapa risiko yang diasosiasikan dengan hambatan yang dapat mempengaruhi sasaran dan akuntabilitas P3DN secara keseluruhan. Identifikasi risiko dalam kaitannya dengan implementasi P3DN menjadi langkah krusial dalam perspektif pengawasan untuk melihat kualitas tata kelola, kecukupan pengendalian, serta rencana mitigasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah/pemangku kepentingan terkait. Hal tersebut tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan khususnya auditor selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah disetiap K/L dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan, persiapan, tender, pelaksanaan pekerjaan hingga serah terima.